



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



UNIVERSITAS ANDALAS
SKRIPSI
PEMAKNAAN UKT SEBAGAI HARGA PERTUKARAN ANTARA
MAHASISWA DAN UNIVERSITAS PTN-BH

Oleh :

Putri Sakinah

2210532012

Dosen Pembimbing :

Dr. Suhandi, S.E, M.Si, Ak., CA

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	Putri Sakinah	No. Alumni Fakultas
	BIODATA a) Tempat/Tanggal Lahir: Pekanbaru/29 Oktober 2004 b) Nama Orang Tua: Deritawan Satri dan Royani Dewita c) Fakultas: Ekonomi dan Bisnis d) Jurusan: Akuntansi e) No. BP: 2210532012 f) Tanggal Lulus: 11 Agustus 2026 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h) IPK: 3.59 i) Lama studi: 4 tahun j) Alamat Orang Tua: Jorong Pasa Sanayan, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat		

PEMAKNAAN UKT SEBAGAI HARGA PERTUKARAN ANTARA MAHASISWA DAN UNIVERSITAS PTN-BH

(Skripsi oleh: Putri Sakinah)

Pembimbing: Dr. Suhandi, S.E, M.Si, Ak., CA

ABSTRACT

This study aims to analyze the meaning of Single Tuition Fee (UKT) as an exchange price between students and universities in State Universities with Legal Entity Status (PTN-BH). The study employs a qualitative method with a phenomenological approach, using primary data from semi-structured interviews with students and university bureaucrats, as well as secondary data from policy documents. The data were analyzed thematically, with Berger and Luckmann's social construction theory serving as the main analytical lens, supported by the concepts of educational commodification and institutional legitimacy. The findings show that UKT is constructed through the processes of externalization, objectivation, and internalization. Students perceive UKT as both an economic burden and an educational investment, while the university perceives it as a source of institutional funding. UKT is jointly understood by students and the university as an exchange price for educational services, but generates different expectations within their socio-economic relationship. The legitimacy of the UKT policy is dynamic and determined by the fairness of UKT classification, transparency in fund management, and the university's responsiveness, while the university faces a structural dilemma in balancing funding needs, service quality improvement, and public expectations that continue to view higher education as a public service. These findings contribute to the development of the higher education financing literature and provide input for universities in formulating more equitable and legitimate UKT policies.

Keywords: Single Tuition Fee, Exchange Price, Social Construction, Institutional Legitimacy, State Universities with Legal Entity Status

**PEMAKNAAN UKT SEBAGAI HARGA PERTUKARAN ANTARA
MAHASISWA DAN UNIVERSITAS PTN-BH**

Oleh:

Putri Sakinah
2210532012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai harga pertukaran antara mahasiswa dan universitas pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan data primer berupa wawancara semiterstruktur terhadap mahasiswa dan birokrasi universitas serta data sekunder berupa dokumen kebijakan. Data dianalisis secara tematik dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann sebagai lensa utama, didukung konsep komodifikasi pendidikan dan legitimasi institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKT dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Mahasiswa memaknai UKT sebagai beban ekonomi sekaligus investasi pendidikan, sedangkan universitas memaknainya sebagai sumber pendanaan institusi. UKT dimaknai bersama oleh mahasiswa dan universitas sebagai harga pertukaran atas layanan pendidikan, tetapi menghasilkan ekspektasi yang berbeda dalam relasi sosial-ekonomi keduanya. Legitimasi kebijakan UKT terbukti bersifat dinamis dan ditentukan oleh keadilan penetapan golongan, transparansi pengelolaan dana, serta responsivitas universitas, sementara universitas menghadapi dilema struktural dalam menyeimbangkan kebutuhan pendanaan, peningkatan kualitas layanan, dan ekspektasi masyarakat yang masih memandang pendidikan tinggi sebagai layanan publik. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan literatur pembiayaan pendidikan tinggi serta menjadi masukan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan UKT yang lebih berkeadilan dan legitimate.

Kata Kunci: Uang Kuliah Tunggal, Harga Pertukaran, Kontruksi Sosial, Legitimasi Institusi, PTN-BH

Pembimbing Skripsi: Dr. Suhandi, S.E, M.Si, Ak., CA